

TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN DPR PADA RUU APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan berkas berisi tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Lode-wijk F. Paulus (kanan) saat rapat paripurna ke-4 DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024.



FOTO: ANTARA

Bank Indonesia Tingkatkan Akses UMKM Berorientasi Ekspor terhadap Pembiayaan

BI mendorong bank untuk mengalokasikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. BI juga memiliki program pembiayaan multichannel financing (Mcf), yang merupakan pembiayaan melalui rantai nilai usaha yang terhubung dengan korporasi atau aggregator.

JAKARTA (IM) - Bank Indonesia (BI) berupaya meningkatkan akses UMKM berorientasi ekspor terhadap pembiayaan sehingga dapat memperluas kontribusi UMKM terhadap ekspor.

"Program kami adalah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor, kami memiliki program pengembangan UMKM yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan akses pembiayaan," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmi Sari dalam Indonesia Development Talk di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/8).

Yunita menuturkan saat ini ada lebih 65 juta UMKM,

namun kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya sebesar 14,7 persen, dan pertumbuhannya juga sangat terbatas. Oleh karenanya, perlu ada strategi dan upaya bersama serta sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memacu UMKM masuk pasar ekspor.

Untuk itu, BI mendorong bank untuk mengalokasikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. BI juga memiliki program pembiayaan multichannel financing (Mcf), yang merupakan pembiayaan melalui rantai nilai usaha yang terhubung dengan korporasi atau aggregator.

Selain itu, BI memberikan dukungan terhadap UMKM baik pada sisi penawaran

maupun permintaan. Di sisi penawaran, BI memberikan insentif berupa pelonggaran kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata hingga satu persen bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.

Di sisi permintaan, BI mendorong akses pembiayaan, pencocokan bisnis (business matching), pengembangan kelompok subsisten, dan

pengembangan UMKM hijau. "Kami memberikan peningkatan kapasitas serta akses terhadap pasar dan akses terhadap pembiayaan," ujarnya.

Pengembangan UMKM berorientasi ekspor dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas UMKM untuk memasuki pasar global dengan memenuhi kualifikasi permintaan pembeli atau negara tujuan ekspor, serta memastikan kuantitas, kualitas, kapasitas, keberlangsungan, pengemasan, standardisasi

dan sertifikasi produksi UMKM untuk pasar internasional.

Pemahaman UMKM terhadap manajemen, prosedur, lisensi usaha dan persyaratan negara tujuan ekspor juga perlu ditingkatkan. Selain itu, kapasitas digital UMKM juga perlu dioptimalkan untuk menunjang kegiatan bisnis, dan optimalisasi platform digital dilakukan sebagai salah satu saluran ekspor UMKM. • dot

Diperluas, Bantuan Pembelian Motor Listrik Berlaku Satu NIK untuk 1 Unit

JAKARTA (IM) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai perluasan penerima program bantuan untuk pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai. Ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dikutip dari laman Kemenperin, Selasa (29/8).

Pada Permenperin 21/2023 ini disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali

pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. "Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik," jelas Agus.

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua. "Pemerintah akan membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri," tutur Agus.

Permenperin 21/2023 juga menegaskan, dalam melakukan proses pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua, diler perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan

menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian. Data itu disebut Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRA).

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi mengaku optimis bahwa penjualan sepeda motor listrik dengan subsidi Rp7 juta dari pemerintah akan mencapai target 200.000 unit pada tahun 2023. Hal ini seiring dengan dilakukannya perluasan terhadap penerima subsidi motor listrik untuk umum, yang akan mengerek jumlah peminat hingga mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

"Dengan adanya skema yang baru pastinya itu akan mendorong minat masyarakat. Sekarang pun sudah banyak industri yang tanyanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini (perubahan skema). Sehingga sampai Desember, kita optimis," papar Budi. • pan

FOTO: ANTARA



OJK GELAR LITERASI KEUANGAN INDONESIA TERDEPAN

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Friderica Widayarsi Dewi (ketiga kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi (kanan), Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar Nur Asyura Anggini Sari (ketiga kanan) memperlihatkan kain tenun khas Kalbar buatan perajin lokal dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) Series#2 di Pontianak, Kalbar, Selasa (29/8). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang investasi dan memperkuat UMKM Indonesia.

Pemerintah Sepakati Penguatan Efektivitas Kebijakan Fiskal di RAPBN 2024

JAKARTA (IM) - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya. Menkeu menyebut, pemerintah sepakat dengan semua Fraksi untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal tahun depan.

"Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat di dalam menghadapi ketidakpastian global," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Selasa (29/8).

Pada Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPR-RI seluruhnya menggarisbawahi semakin kompleks dan beratnya tantangan mengelola ekonomi ke depan, khususnya ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai potensi implikasinya.

"Kita patut bersyukur bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang kuat maka Indonesia mampu mengatasi pandemi dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan di dalam mewujudkan semua Visi Indonesia Maju 2045", tambah Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan, dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global pasca pandemi, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. Untuk itu, APBN akan terus dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menuntaskan berbagai prioritas pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun memaparkan jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan kualitas belanja.

Selain itu ia juga menjelaskan kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), upaya pemerintah untuk menjamin subsidi tepat sasaran, peningkatan sinergi keuangan pusat-daerah, dan sebagainya.

Sri Mulyani pun menyambut baik dukungan anggota Dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus," kata Sri Mulyani. • dro



Bahlil: Hilirisasi Berikan Nilai Tambah untuk Ekonomi Daerah

JAKARTA (IM) - Menteri Investasi, Bahlil Laha-dalia, menyampaikan bahwa program hilirisasi sumber daya alam yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Konsep hilirisasi ini sebagai instrumen untuk bagaimana bisa nilai tambah itu ada di daerah," kata Bahlil dalam sebuah sesi kuliah umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/8).

Kementerian Investasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi nomor 1 tahun 2022 yang mendorong kolaborasi antara investasi besar dengan pengusaha nasional di daerah.

Dia menuturkan peraturan tersebut dibuat guna mendorong investasi di daerah untuk pemerataan ekonomi. "Saya sudah buat peraturan menteri, setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah yang ada di daerah bukan pengusaha daerah yang ada di Jakarta," ujar Bahlil.

Bahlil menyebutkan mendorong investasi di luar Pulau Jawa terus digalakkan untuk mewujudkan visi pemerataan Indonesia sentris yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Dia menjelaskan bahwa

sejak tahun 2020 kuartal ketiga realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari Pulau Jawa, dimulai dari 50,5 persen, dan terus bertumbuh hingga pada tahun 2023 kuartal kedua investasi di luar Pulau Jawa telah mencakup 53 persen.

"Sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 kuartal kedua alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa, sebesar 53 persen. Kita bangun pemerataan ini semua supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonominya itu dari Aceh sampai Papua," kata Bahlil.

Lebih jauh dia menjelaskan salah satu contoh kawasan industri hilirisasi di daerah yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya adalah kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (WIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut data yang dihimpun Kementerian Investasi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2018 hingga 2020 berada di bawah 10 persen.

Begitu memasuki tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat menjadi 16,79 persen dan berada di atas angka 20 persen di tahun 2022 (22,94 persen) dan semester 1 tahun 2023 (20,26 persen). • hen

Bukit Asam Raup Laba Rp2,8 T

JAKARTA (IM) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membukukan laba bersih Rp2,8 triliun dalam 6 bulan pertama tahun 2023. Perolehan laba bersih ini turun sekitar 54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,15 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung oleh peningkatan kinerja operasional Perseroan sepanjang Semester I 2023. Total produksi batu bara PTBA pada Semester I 2023 mencapai 18,8 juta ton, tumbuh 18% dibanding periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 15,9 juta ton.

Kenaikan produksi ini seiring dengan kenaikan volume penjualan batu bara sebesar 19% menjadi 17,4 juta ton. Pada Semester I 2023, Perseroan mencatat penjualan ekspor sebesar 7,1 juta ton atau naik 37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebesar 57%.

Kemudian pendapatan perseroan tercatat Rp18,9 triliun tumbuh 2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu total aset perusahaan sebesar Rp46,3 triliun per Semester I.

Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra mengungkapkan berbagai hal yang menjadi tantangan bagi perseroan di tahun ini, di antaranya adalah koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar.

Harga batu bara ICI-3 menurun sekitar 48% dari US\$138,5 per ton pada Juni 2022 menjadi US\$72,63 per ton pada Juni 2023. Di sisi lain, Harga Pokok Penjualan mengalami kenaikan, di antara

ranya pada komponen biaya royalti, angkutan kereta api, dan jasa penambangan.

"Karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja positif," kata dia dalam siaran pers, Selasa (29/8).

Lalu perseroan juga konsisten mengedepankan *cost leadership* di setiap lini perusahaan, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA. Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional.

Perseroan telah memperoleh izin Kawasan Industri berbasis batu bara atau Bukit Asam Coal Based Industrial Estate di Tanjung Enim dengan luas 585 Ha, dan saat ini dalam proses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perusahaan telah menyediakan lahan untuk pembangunan industri hilirisasi yang bekerja sama dengan mitra potensial. Selain itu, PTBA telah mengalokasikan cadangan batu bara khusus untuk proyek hilirisasi, sehingga kebutuhan batu bara untuk industri hilirisasi dapat terjamin. • hen